



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (**LKj**) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dapat diselesaikan, sebagai bentuk laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2015.

LKj Pemerintah Provinsi Lampung disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerjanya, LKj Pemerintah Provinsi Lampung bertujuan untuk menyampaikan perkembangan atas capaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) Provinsi Lampung selama kurun waktu satu tahun dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dalam mewujudkan Visi dan Misi dari Kinerja Gubernur Lampung Periode Tahun 2014 – 2019 yang didasari **RPJMD** Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis (**RENSTRA**) Satuan Kerja Perangkat Daerah (**SKPD**) dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 serta Dokumen Pelaksana Anggaran (**DPA**) SKPD Tahun 2015.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2015 telah banyak membuahkan hasil pembangunan, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.

Berkenaan dengan itu, akhirnya kami berharap melalui penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 ini menjadi media untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan tahun pertama agar ke depan dapat berkinerja lebih



produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Telukbetung, Maret 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO